

WON THE BATTLE BUT LOST THE WAR: LUPUTNYA MACHTSVORMING PASCA REFORMASI 1998

Ditulis oleh Alana Putra



Genap [26 tahun](#) setelah [Reformasi 1998](#), masyarakat Indonesia masih meraba-raba bentuk ekspresi demokrasi. Bagi sebagian orang, ekspresi demokrasi adalah kegiatan musiman dalam politik elektoral, di mana rakyat berhak memilih pemimpinnya dalam 5 tahun sekali. Bagi sebagian lainnya, proses demokrasi adalah kegiatan “aksi” berupa demonstrasi apabila ada peristiwa genting yang mengancam hak kebebasan mereka. Namun, kedua hal tersebut merupakan bentuk ekspresi demokrasi yang bersifat sporadis dan jangka pendek.

Pasca musim elektoral berakhir, masyarakat Indonesia abai dalam mengawal pemerintahan barunya. Proses *check & balances* malah biasa dilakukan oleh mahasiswa—yang seringnya melalui aksi demo. Tapi, aksi ekstra parlementer tersebut juga tidak berkembang jadi proyek politik yang kuat dan *sustainable*. Ini karena konsolidasi lintas-kekuatan sulit dilakukan, akibat efek domino dari depolitisasi Orde Baru terhadap partai politik dan organisasi masyarakat—termasuk organisasi buruh dan organisasi perempuan—yang [disingkirkan](#) dari aktivitas politik.

Hal ini membuat posisi tawar mahasiswa sebagai basis kekuatan utama massa itu lemah. Perlawanan mereka terhadap problematika isu HTN selama 5 tahun terakhir bahkan tak kunjung menemukan titik terang.

Iklm demokrasi kita memang se-belum mapan itu. Peristiwa Reformasi nampak tak ubahnya seperti proses kocok-ulang formasi di dalam sistem pemerintahan alih-alih proses transformasi secara struktural-kultural. Reformasi 1998 pada akhirnya hanya membawa negara ini pada fase interegnum; kondisi ‘melayang-layang’ dan serba tak pasti; kondisi gagap saat diharuskan menerima transisi periodik; atau dalam bahasa [Antonio Gramsci](#): “*the old is dying and the new cannot be born*”.

Dalam fase interegnum ini, tercipta ruang hampa (*wiggle room*) yang bisa dimanfaatkan dan dikooptasi oleh siapapun. Maka dari itu, hanya butuh sebuah momentum dan aktor yang jeli untuk mempengaruhi arah perubahan negeri ini dalam sekejap. Kini, kita dapat melihat bahwa golongan yang berhasil mengkooptasi ruang hampa itu bukanlah golongan progresif pro-demokrasi, melainkan justru golongan pro-oligarki yang ingin membajak demokrasi; pengkhianat dari perjuangan reformasi itu sendiri.



Kalah *Start* dalam Mengorganisir Massa

Golongan masyarakat progresif di Indonesia senang meromantisir Reformasi, hingga lupa bahwa ada '[massa mengambang](#)' yang harus mereka organisir. Pasca 1998, kebanyakan masyarakat Indonesia masih gagap soal politik. Puluhan tahun Soeharto mendepolitisasi rakyatnya dan mensterilkan mereka dari diskusi politik nyatanya punya efek jangka panjang yang masih langgeng.

Karena kesadaran politik yang belum terbangun, masyarakat Indonesia jadi terfragmentasi. Yang kelas-bawah rentan dikontrol dengan dana bantuan sosial (bansos). Yang kelas-menengah jadi 'massa mengambang' yang teralienasi dari diskursus politik. Kondisi masyarakat seperti ini bikin warga Indonesia lebih mudah terjerumus ke dalam konflik horizontal dan buta terhadap problema struktural.

Di sisi lain, sistem elektoral dan infrastruktur politik di Indonesia juga belum matang. Kelemahan inilah yang kemudian dieksploitasi golongan [oligarki](#): dengan membuat partai-partai baru. Ketentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dalam [UU Pemilu](#) justru malah jadi *loophole* yang dimanfaatkan para *oligarch* untuk memonopoli sistem kepartaian—yang secara bersamaan juga menggugurkan kemunculan partai-partai alternatif. Sekarang, partai politik dengan ideologi dan *stance* yang kuat malah hanya bisa [dihitung jari](#).

Legacy Reformasi dalam sekejap dihancurkan karena masyarakat Indonesia belum cakap dalam melakukan siasat [machtsvorming](#) (memupuk kekuasaan). Ini karena taktik masyarakat progresif di Indonesia cenderung bercorak defensif alih-alih ofensif: mereka bersikap untuk memastikan sistem berjalan baik-baik saja (dan mengkritik atau mendemonya bila ada yang tak beres) alih-alih mengotak-atik sistem untuk *inventing new model system* yang lebih sehat dan demokratis.

Mencari Upaya dalam Membangun 3.5% *Critical Mass*

Gerakan progresif di Indonesia sudah semestinya beranjak dari corak defensif-reaktif menuju corak ofensif-preventif. Salahnya kita pasca 1998 adalah gak punya Front massa progresif yang besar dan terorganisir untuk mempromosikan agenda politik yang kita mau. Kita luput ber-*machtsvorming*, luput membuat wadah, luput menggalang kekuatan dan kekuasaan baru. Kini, sudah saatnya gerakan progresif diarahkan untuk mengisi kekosongan taktik *machtsvorming* yang tak dilakukan generasi sebelumnya.

Tapi sebelum menjangkau hal itu, kesadaran kritis masyarakatnya memang perlu dibangun lebih dulu. Untuk itu ruang digital bisa jadi sarana yang tepat untuk membumikan *consciousness* tersebut kepada masyarakat. Kemunculan CSO seperti [Bijak Memilih](#) adalah satu contoh revolusioner yang sukses bikin masyarakat kelas-menengah dan Gen-Z jadi melek politik. Jasa Bijak Memilih dalam membuat informasi mengenai kandidat elektoral jadi lebih aksesibel harusnya bikin KPU segera muhasabah diri.

Bijak Memilih ini sendiri memang punya target audiens spesifik: kelas-menengah. Mereka mengamini pemikiran [Erica Chenoweth](#); bahwa untuk mencapai perubahan, kita hanya perlu menggerakkan [3.5%](#) massa kritis dari total populasi. Dengan memberdayakan kelas-menengah dan Gen-Z yang selama ini jadi 'anak tiri' dalam diskursus politik, mereka berupaya menciptakan 3.5% massa kritis tersebut.

Tapi, konsep 3.5% massa kritis tersebut juga [perlu](#) dukungan publik yang lebih luas. Nyatanya, kita kecolongan *start* lagi dalam mengorganisir massa akar rumput via [Tiktok](#). Untuk bikin gerakan progresif lebih *sustainable*, mengorganisir massa akar rumput dan menternak wadah-wadah dan gerakan lain yang lintas-*platform* dan inklusif itu perlu. Lakukan kegiatan 'penerangan'; bangun dulu kesadarannya, berdayakan dulu masyarakatnya, baru kita bicara soal revolusi dan perubahan dengan [mengotak-atik sistemnya](#). Inilah siasat *machtsvorming* yang seharusnya kita tunaikan dari dulu: untuk membangun [power](#).